

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial penduduk setempat dan anggotanya. Pemerintah Indonesia telah memulai program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹

Sebagai komponen penting dari masyarakat bisnis nasional, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dan strategis dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. UMKM dan koperasi dapat menyediakan sejumlah besar kesempatan kerja dan menawarkan layanan ekonomi penting bagi masyarakat. Secara khusus, mereka berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional secara umum dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyeimbangkan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM dan koperasi memiliki peran penting dalam menciptakan peluang bisnis dan lapangan kerja, menghasilkan produk nasional, meningkatkan ekspor, serta meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 tentang koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang

¹ Purnamasari, H & Ramdani, R. (2020). Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesia

² Said, Adri dan Widjaja, Ika. 2007. Akses Keuangan UMKM. Jakarta. GTZ-RED

kegiatannya berlandaskan pada asas koperasi dan merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Koperasi berada pada kedudukan yang kuat karena memiliki landasan konstitusional yang kuat.

Kehidupan berkoperasi kini telah menjadi hal yang penting bagi masyarakat. Sebab, mengelola koperasi berarti membantu masyarakat Indonesia mengembangkan perekonomiannya. Sebagai penggerak ekonomi, tujuan pemerintah adalah memajukan koperasi sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, memiliki bakat dapat menjadi alat untuk mendorong perekonomian negara.

Koperasi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan dan potensi anggotanya serta masyarakat luas. Koperasi secara aktif berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan anggotanya. Koperasi sangat penting di Indonesia karena koperasi menggerakkan perekonomian negara, membangun masyarakat yang mandiri, membuka pasar baru, dan menyediakan peluang bagi usaha kecil dan menengah. Selain memperkuat dan menstabilkan ekonomi rakyat Indonesia, koperasi berfungsi sebagai landasan kekuatan dan ketahanan ekonomi negara serta berupaya membangun ekonomi nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi dan kekeluargaan.

Koperasi merupakan fondasi perekonomian Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perekonomian diharapkan dapat tumbuh dan berkembang melalui pemberdayaan masyarakat melalui koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pasal 4, menegaskan hal tersebut. Disebutkan bahwa peran dan fungsi koperasi antara lain adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan manusia, memperkuat

perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, dan mendorong pemuda bangsa untuk berkreasi dan berorganisasi.³

Diharapkan kontribusi maksimal dan ideal koperasi akan menghasilkan perekonomian nasional yang tumbuh seiring dengan ekspansi koperasi itu sendiri. Hal ini dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan menurunkan angka pengangguran yang tinggi. Koperasi tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam meningkatkan standar hidup anggota, memperkuat demokrasi, dan memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan standar hidup bagi anggotanya dan masyarakat umum.⁴

Keberadaan koperasi di Indonesia sangat penting karena jika diukur dari kesejahteraan masyarakat, negara ini sendiri masih mengalami kesulitan. Keberadaan koperasi yang beroperasi sesuai aturan memungkinkan tujuan koperasi yaitu kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi di daerah tersebut dapat terwujud. Namun, dalam praktiknya, keberadaan koperasi di Indonesia tidak selalu menguntungkan masyarakat karena, jika koperasi dikelola dengan buruk, baik anggotanya maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan memperoleh apa pun.

Perkembangan koperasi di Indonesia memang cukup pesat keberadaannya, hal tersebut sesuai dengan data perkembangan koperasi di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2020-2023.

Tabel 1 1 Jumlah Unit Koperasi di Indonesia 2020-2023 Menurut Survei yang dilakukan Kementrin Koperasi dan UKM RI

Tahun	Jumlah Unit Koperasi
2020	127.124

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4

⁴ Nasution, Muslimin. (2008). Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional. Jakarta: PIP & LPEK

2021	127.846
2022	130.354
2023	130.529

Sumber: Kemenkop UKM RI 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun hal ini tidak berarti bahwa semua koperasi saat ini sedang menghadapi kesulitan.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, rendahnya keterampilan, pengetahuan, pengelolaan SDM, keuangan, pemasaran, dan kewirausahaan merupakan beberapa tantangan yang dihadapi koperasi Indonesia saat ini. Akibatnya, koperasi menjadi kurang aktif dan kinerja serta harapan hidupnya menurun. Oleh karena itu, perlu diperhatikan baik jumlah koperasi maupun peningkatan kualitasnya. Keberadaan koperasi memang tidak luput dari adanya suatu permasalahan, seperti semakin meningkatnya jumlah koperasi yang tidak aktif, dan salah satu permasalahan tersebut terjadi diprovinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa daerah yang terdiri dari 19 Kota atau Kabupaten. Jika dilihat dari sektor koperasinya masing-masing daerah tersebut memiliki komposisi koperasi yang berbeda-beda. Berikut ini dapat dilihat jumlah koperasi di Sumatera Barat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 2 Jumlah Unit Koperasi di Sumatera Barat pe Desember 2023

Kabupaten /Kota	Jumlah Unit Koperasi
Kab.kepulauan Mentawai	59
Kab Pesisir Selatan	300
Kab Solok	115
Kab Sijunjung	119
Kab Tanah Datar	223
Kab Padang Pariaman	111
Kab Agam	256
Kab Lima Puluh Kota	219

Kab Pasaman	92
Kab Solok Selatan	103
Kab Pasaman Barat	282
Kab Dharmasraya	96
Kota Padang	776
Kota Solok	79
Kota Sawahlunto	80
Kota Padang Panjang	93
Kota Bukittinggi	104
Kota Payakumbuh	106
Kota Pariaman	108
Jumlah	4220

Sumber: Kemenkop UKM RI 2023

Berdasarkan tabel diatas, Dengan jumlah koperasi sebanyak 776 unit, Kota Padang merupakan kota dengan jumlah koperasi terbanyak yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan jumlah koperasi di Kota Padang lebih banyak dibandingkan dengan kota atau daerah lain di Sumatera Barat, sehingga dipilih sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumbar, pada 2023 nanti akan ada tambahan 203 koperasi di Sumbar. "Kami pantau jumlah koperasi di Sumbar bertambah 203 unit sepanjang 2023," kata Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Junaidi, di Padang." Berdasarkan data dari Dinas UMKM dan Koperasi Sumbar, hingga akhir Desember 2023 tercatat 4.220 koperasi di daerah itu, imbuhnya. Jika dibandingkan dengan 4.017 unit koperasi yang disurvei BPS Sumbar pada Juni 2023, jumlah tersebut lebih banyak.⁵

Kondisi Kota Padang yang memiliki luas wilayah 1.414,96 km² dan terdiri dari 104 kelurahan dan 11 kecamatan juga mendukung hal tersebut. Selain luas wilayah kota, jumlah koperasi juga cukup banyak. Pada tahun 2023, jumlah koperasi di Kota Padang mencapai 776

⁵ <https://www.google.com/amp/s/sumbar.antaraneews.com/amp/berita/598596/diskop-ukm-koperasi-di-sumbar-bertambah-203-unit-pada-2023>

unit yang terbagi dalam lima jenis, yaitu koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam.

Tabel 1 3 Jenis Koperasi di Kota Padang

Jenis Sektor Koperasi	Kelompok koperasi
Koperasi simpan pinjam	KPRI, KSP, KJKS/KSPPS
Koperasi pemasaran	KOPONTREN, KSU, Kop Lainnya
Koperasi Jasa	KOPINKRA, Koperasi Angkutan Darat, Koperasi Profesi, Koperasi Pertanian, Koperasi Lainnya
Koperasi Produsen	KUD, Koperasi nelayan, koperasi peternak, KOPINKRA, koperasi wanita, koperasi lainnya
Koperasi Konsumen	KOPONTREN, Koperasi Peternakan, KPRI, KOPKAR, Koperasi Angkutan Darat, Koperasi Kepolisian, Koperasi Angkutan Laut, KSU, Koperasi Pasar, Koperasi Wanita, Koperasi Profesi, Koperasi WREDATAMA, Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pemuda, Koperasi Pertanian, Koperasi Guru Sekolah Swasta, Koperasi Pensiunan, Koperasi Perguruan Tinggi, Koperasi Masjid, Koperasi Lainnya

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang 2023

Berdasarkan tabel data jenis koperasi diatas terdapat jenis koperasi dengan kelompok koperasi di Kota Padang pada tahun 2023, pada jenis Koperasi Simpan Pinjam terdapat beberapa kelompok koperasi yang terdiri dari koperasi KPRI, KSP, KJKS/KSPPS, pada Koperasi Jasa terdapat kelompok koperasi KOPINKRA, koperasi Angkutan Darat, Koperasi Profesi, Koperasi Pertanian, dan koperasi lainnya, Pada jenis koperasi Produsen terdapat kelompok koperasi KUD,

koperasi Nelayan, Koperasi Peternak KOPINKRA, koperasi Wanita, dan koperasi lainnya, dan yang terakhir pada jenis koperasi Konsumen terdapat kelompok koperasi KOPONTREN, Koperasi Peternakan, KPRI, KOPKAR, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi Kepolisian, Koperasi Angkatan Laut, KSU, Koperasi Pasar, Koperasi Wanita, Koperasi Profesi, Koperasi Wredatama, Koperasi mahasiswa, Koperasi Pemuda, Koperasi Pertanian, Koperasi Guru Sekolah Swasta, Koperasi Pensiunan, Koperasi Perguruan Tinggi, Koperasi Masjid, Koperasi Lainnya.

Pemerintah Kota Padang telah menetapkan visi dan tujuan untuk mewujudkan tujuan tersebut. “Mewujudkan masyarakat Kota Padang yang beradab berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang unggul dan berdaya saing” merupakan visi dan tujuan Pemerintah Kota Padang. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Padang mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia yang beriman, berwawasan, berdaya cipta, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan Kota Padang yang lebih baik, lebih aman, lebih bersih, lebih tertib, dan lebih ramah dengan tetap menghargai kearifan lokal.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif.
4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan inovasi.
5. Meningkatkan standar penyelenggaraan pariwisata yang berkesan dan menyenangkan
6. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan, tanggap bencana, dan peduli bencana
7. Meningkatkan standar pelayanan publik yang baik dan tata kelola pemerintahan yang bersih

Sesuai dengan Perwako Padang No 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Berikut tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang:

1. Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - b) Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶

Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang adalah untuk mendorong kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi. Melalui stimulasi dan peningkatan investasi di berbagai sektor, serta ekonomi kerakyatan dengan pola kemitraan, tujuan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan Kota Padang. Inisiatif pemerataan merupakan ciri pertumbuhan ekonomi yang kuat guna memastikan proses yang cepat dan berkelanjutan.

Pemanfaatan sumber daya yang didukung oleh kompetensi tinggi untuk mencapai daya saing berkelanjutan merupakan upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Kapasitas fiskal

⁶ Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2022

yang kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, merupakan ciri dari penguatan ekonomi. Dinas Koperasi meyakini bahwa dengan memperkuat UMKM dan koperasi di Kota Padang, maka koperasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan menurunkan angka kemiskinan.

Kegiatan koperasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya. Meskipun demikian, koperasi di Kota Padang dan seluruh Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan koperasi di daerah, khususnya di Kota Padang, merupakan masalah yang sangat strategis untuk diteliti dan dibahas mengingat semakin menurunnya kualitas koperasi di Kota Padang..

Meskipun jumlah unit koperasi terus bertambah dibandingkan tahun 2021 dan 2023, populasi koperasi di Kota Padang mengalami pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan ini tidak menghilangkan keberadaan koperasi yang tidak aktif. Koperasi di Kota Padang menghadapi tantangan, terutama meningkatnya jumlah koperasi yang tidak aktif, meskipun jumlah unit koperasi terus bertambah. Berikut dibuktikan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1 4 Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kota Padang Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	2021			2022			2023		
		Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1.	Bungus Teluk Kabung	27	9	18	27	9	18	29	8	21
2.	Koto Tangah	102	61	41	107	66	41	111	64	47
3.	Kuranji	59	36	23	62	37	25	62	36	26
4.	Lubuk Begalung	51	29	22	52	30	22	57	27	30

5.	Lubuk Kilangan	45	29	16	45	28	17	47	28	19
6.	Nanggalo	36	19	17	36	19	17	35	22	13
7.	Padang Barat	132	75	57	132	70	62	127	58	69
8.	Padang Selatan	72	34	38	74	38	36	63	35	28
9.	Padang Timur	100	59	41	102	62	40	100	52	48
10.	Padang Utara	87	54	33	87	55	32	95	54	41
11.	Pauh	48	23	25	49	25	24	50	27	23
	Jumlah	759	428	331	773	440	333	776	411	365

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel data, jumlah koperasi di sebelas kecamatan di Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2021–2023. Jumlah koperasi yang tidak aktif di Kota Padang mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Terlihat bahwa jumlah koperasi yang tidak aktif meningkat sebanyak 365 pada tahun 2023 setelah sebelumnya mencapai 331 pada tahun 2021 dan 333 pada tahun 2022.

Penyebab tidak aktifnya koperasi yang ada di Kota Padang ini beragam. Salah satunya dibuktikan berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Pemberdayaan Koperasi berikut hasil wawancaranya:

“ Iya memang benar terjadi peningkatan koperasi tidak aktif, Penyebab tidak aktifnya koperasi yang ada di Kota Padang ini beragam. Seperti tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, manajemen pengelolaan yang buruk, Laporan keuangan yang tidak ada hingga lemahnya sumber daya manusia. Apabila sudah 2 kali gagal melakukan Rapat Anggota Tahunan Koperasi maka koperasi dapat dibubarkan dan ada juga ditemukan koperasi itu sebenarnya masih aktif tapi di dokumen dinas tertulis tidak aktif dikarenakan mereka tidak memberikan laporan ke Dinas setelah melakukan RAT maka dikatakan tidak aktif.” (hasil wawancara dengan Jamilus sebagai Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Senin 13 Mei 2024 pukul 09.00 WIB).

Dari hasil wawancara membuktikan yang paling sering ditemukan yaitu tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, tidak adanya laporan keuangan, manajemen pengelolaan

yang buruk dan juga lemahnya sumber daya manusia. Apabila sudah 2 kali gagal melakukan Rapat Anggota Tahunan Koperasi maka koperasi dapat dibubarkan Karena itu penting untuk memahami jenis dan bentuk usaha Koperasi serta hak dan kewajiban anggota serta pengurus sebelum membentuk Koperasi.

Berikut data daftar Koperasi yang aktif dan tidak aktif menurut kelompok Koperasi tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1 5 Daftar Koperasi di Kota Padang Menurut kelompok koperasi tahun 2021-2023

No	Kelompok koperasi	2021			2022			2023		
		Jumlah Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah Koperasi	Aktif	Tidak Aktif
1.	Kjks/Ksps	112	98	14	112	98	14	122	96	26
2.	Kop. Angkatan Darat	15	8	7	15	8	7	12	2	10
3.	Kop. Angkatan Laut	3	1	2	3	1	2	3	1	2
4.	Kop. Angkatan Udara	1	1	0	1	1	0	1	1	0
5.	Kop. Angkutan Darat	29	3	26	30	5	25	31	19	12
6.	Kop. Guru Sekolah Swasta	7	3	4	7	3	4	7	3	4
7.	Kop. Kepolisian	5	3	2	5	4	1	6	4	2
8.	Kop. Mahasiswa	4	3	1	4	3	1	4	3	1
9.	Kop. Masjid	41	8	33	41	8	33	44	12	32
10.	Kop. Nelayan	5	0	5	5	0	5	5	0	5

11.	Kop. Pasar	9	4	5	9	3	6	9	5	4
12	Kop. Pemuda	1	1	0	1	1	0	1	0	1
13	Kop. Pensiunan	3	3	0	8	6	2	7	4	3
14	Kop. Pepabri	1	1	0	1	1	0	2	2	0
15	Kop. Perguruan Tinggi	6	1	5	6	1	5	6	3	3
16	Kop. Pertanian	5	4	1	5	3	2	12	4	8
17	Kop. Peternakan	2	1	1	2	0	2	2	1	1
18	Kop. Profesi	4	2	2	4	1	3	4	3	1
19	Kop. Serba Usaha	47	15	32	47	15	32	45	12	33
20	Kop. Simpan Pinjam	37	17	20	37	17	20	40	22	18
21	Kop. Wanita	19	8	11	19	8	11	19	8	11
22	Kop. Wisata	2	0	2	2	0	2	2	0	2
23	Kop. Wredatama	3	3	0	3	3	0	3	1	2
24	Kopinkra	4	1	3	4	1	3	4	1	3
25	Kopkar	45	23	22	46	24	22	42	14	28
26	Koppontr en	5	1	4	5	1	4	5	1	4
27	Kpri	192	146	46	191	146	45	188	134	54
28	Kud	12	6	6	12	7	5	12	4	8
29	Koperasi Sekunder	2	1	1	2	1	1	2	1	1
30	Kop. Lainnya	138	62	76	150	65	85	136	50	86
	Jumlah	759	428	331	773	440	333	776	411	365

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang 2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jenis koperasi yang memiliki jumlah koperasi tidak aktif terbanyak di Kota Padang yaitu koperasi jenis KPRI. Jumlah KPRI yang tidak aktif sebanyak

54 unit koperasi. Berikut juga dapat dilihat pada jumlah aset koperasi di Kota Padang pada tahun 2022-2023.

Tabel 1 6 Jumlah Aset Koperasi di Kota Padang 2022-2023

Jenis Koperasi	Jumlah Aset Koperasi	
	2022	2023
KJKS/KSPPS	456.247.548.701	252.603.683.406
Kop Angkatan Darat	27.127.035.295	22.765.648.120
Kop Angkatan Laut	2.838.679.229	3.486.112.671
Kop Angkatan Udara	2.222.722.492	2.222.722.492
Kop Angkutan Darat	7.767.498.941	11.600.898.318
Kop Guru Sekolah Swasta	13.349.396.961	15.681.734.590
Kop Kepolisian	60.471.756.433	31.794.752.557
Kop Mahasiswa	1.704.791.751	1.472.790.014
Kop Masjid	12.840.552.241	13.837.481.017
Kop Nelayan	1.319.372.806	1.319,372,806
Kop Pasar	12.727.384.927	12.043.774.438
Kop Pemuda	89.806.250	89.806.250
Kop Pensiunan	6.986.194.536	18.017.338.939
Kop Pepabri	248.648.894	248.648.894
Kop Perguruan Tinggi	5.747.097.172	5.963.162.670
Kop Pertanian	1.686.489.873	1.831.903.585

Kop Peternakan	1. .325.147.608	1.317.634.424
Kop Profesi	13.932.253.597	6.574.368.965
Kop Serba Usaha	24.268.817.136	29.825.833.354
Kop Simpan Pinjam	24.706.328.835	37.876.553.068
Kop Wanita	8.305.987.036	9.419.443.406
Kop Wisata	126.197.000	126.197.000
Kop Wredatama	378.056.334	403.823.975
KOPINKRA	617.336.625	619.931.541
KOPKAR	831.414.776.116	686.835.431.020
KOPONTREN	1.914.134.547	2.667.897.992
KPRI	851.689.082.115	594.880.048.380
KUD	18.886.683.974	9.232.249.176
Kop Lainnya	46.107.144.222	60.982.630.578

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang 2023

Pada data aset koperasi terlihat jumlah aset koperasi di Kota Padang yang mana jumlah aset paling banyak dimiliki oleh KOPKAR, kemudian disusul oleh KPRI, walaupun pada peringkat kedua namun jika dilihat jumlah aset koperasi KPRI mengalami penurunan yang sangat jauh pada tahun 2023, yang mana hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti manajemen yang tidak efektif, kurangnya partisipasi dari anggota koperasi, penyelewengan dana dari pengurus koperasi, kredit macet, serta kurangnya inovasi. Hal tersebut membuktikan terjadinya masalah pada koperasi KPRI di Kota Padang. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian ke jenis koperasi KPRI.

Didirikan oleh para pegawai negeri sipil, KPRI merupakan koperasi yang dikelola untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, KPRI lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anggotanya

yang berstatus pegawai negeri sipil. Warga negara Indonesia yang memenuhi standar tertentu diangkat sebagai pegawai tetap ASN oleh pejabat pembina pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan pemerintahan. Orang-orang ini dikenal sebagai pegawai negeri sipil, atau disingkat PNS. Pegawai negeri sipil membutuhkan uang tambahan untuk menghidupi keluarga dan/atau memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pegawai negeri sipil dapat meminjam uang dari bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan uang tambahan yang mereka butuhkan. Sebagai koperasi, KPRI mengutamakan kesejahteraan anggotanya yang berstatus pegawai negeri sipil. Berikut adalah beberapa bidang utama KPRI:

1. Simpan Pinjam: salah satu bidang utama KPRI adalah simpan pinjam, yang menyediakan layanan kredit atau pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Layanan ini membantu anggotanya mengatasi kebutuhan keuangan mendesak atau untuk modal usaha.
2. Konsumsi: KPRI juga bergerak di bidang koperasi konsumsi, yang menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian, atau barang-barang konsumsi lainnya dengan harga terjangkau bagi para anggotanya.

Dengan berbagai bidang usaha ini, KPRI membantu anggotanya dalam mengelola kebutuhan keuangan, serta memperbaiki kesejahteraan anggotanya. Namun, kondisi KPRI yang ada di Kota Padang mengalami peningkatan pada jumlah koperasi tidak aktifnya. Banyaknya koperasi yang tidak aktif bisa disebabkan oleh berbagai hal. Penyebab tidak aktifnya KPRI yang ada di Kota Padang ini beragam. Salah satunya dibuktikan berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid pengawasan koperasi sebagai berikut:

“Penyebab tidak aktifnya koperasi ini karena kurangnya komitmen dan kompetensi pengurus, yang dimana pengurus tidak melaksanakan RAT dikarenakan pengurus tersebut juga memiliki pekerjaan lain contohnya guru, jadi dia tidak sempat untuk melaksanakan

RAT.” (hasil wawancara dengan Harce Novarina selaku Kabid pengawasan Koperasi, jum’at, 7 september 2024 pukul 15.00 WIB).

Dari data wawancara dengan Kabid pengawasan Koperasi di atas membuktikan penyebab ketidak aktifan KPRI yang ditemukan yaitu tidak kompetennya pengurus dalam berkoperasi dan masih kurang kesadaran pengurus untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan karena pengurus yang sibuk dengan pekerjaan sehari-harinya, dan kemampuan dalam berkoperasi yang masih kurang.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang harus terus berupaya lebih mengoptimalkan guna menanggulangi masalah banyaknya koperasi yang tidak aktif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi yang tidak aktif, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang telah menerapkan beberapa strategi berikut:

Tabel 1 7 Strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kualitas koperas di Kota Padang

No.	Program	Tindakan
1	Program pengawasan dan tindakan Koperasi	-Pengawasan Kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kota -Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan perundang-undangan Kewenangan
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kota -Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kota
3	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-Melakukan kunjungan kepada Koperasi-Koperasi -peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Sumber : Hasil Olahan Peneliti dari Data Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang 2023

Sebagaimana yang tertera pada tabel di atas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang memiliki tiga strategi untuk meningkatkan mutu koperasi di Kota Padang guna menekan jumlah

koperasi yang tidak aktif. Sebagai bagian dari program pengawasan dan penindakan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terlebih dahulu melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pengurus koperasi guna mengukur efektivitas koperasi. Pengawas koperasi di setiap kecamatan juga melakukan pengawasan terhadap lembaga dan usaha koperasi, khususnya pada sektor simpan pinjam. Apabila ditemukan pelanggaran, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembinaan atau pemberian sanksi.

Kedua program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi tujuan dari program ini yaitu untuk memastikan koperasi beroperasi secara sehat dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yang mana koperasi yang ingin dinilai harus menyerahkan dokumen seperti laporan RAT, laporan keuangan, profil kelembagaan. Setelah itu tim teknis Dinas Koperasi akan melakukan analisis mendalam terhadap dokumen yang telah diserahkan. Penilaian ini mencakup aspek kelembagaan, usaha, dan manajemen keuangan koperasi. Hasilnya akan dinilai dengan skoring untuk menentukan tingkat kesehatan koperasi. Data yang diperoleh dianalisis lebih lanjut untuk menentukan status kesehatan koperasi. Hasil penilaian ini akan dituangkan dalam bentuk sertifikat yang diberikan kepada koperasi yang bersangkutan. Dan setelah penilaian selesai, koperasi diundang ke Dinas untuk menerima sertifikat dan penjelasan terkait hasil penilaian kesehatan mereka.

Ketiga program pendidikan dan pelatihan perkoperasian, program ini dilakukan dengan pelatihan tatap muka langsung dengan metode diskusi dimana narasumber melibatkan pengurus pada koperasi yang bermasalah.

Program pendidikan dan pelatihan koperasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk mengatasi koperasi yang tidak aktif. Kegiatan program ini berupa pelatihan bagi seluruh koperasi, sebagaimana tertuang dalam

dokumen Dinas UMKM dan Koperasi Kota Padang. Berikut ini pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang:

“Sebagai upaya dalam mengurangi angka Koperasi tidak aktif Dinas memiliki salah satu program, yaitu program pendidikan dan pelatihan perkoperasian Pada program pendidikan dan pelatihan perkoperasian, kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan Kunjungan rutin ke lokasi Koperasi untuk melihat kondisi dan permasalahan yang dihadapi, memberikan pendampingan dan pelatihan langsung kepada pengurus, pengawas dan anggota Koperasi dalam menyelesaikan permasalahan, mengidentifikasi kebutuhan spesifik Koperasi dan menyusun solusi yang tepat, memberikan pelatihan manajemen dan tata kelola Koperasi bagi pengurus, pengawas dan anggota Koperasi.” (hasil wawancara dengan Jamilus sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang)

Prinsip utama program ini adalah tujuan Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan perekonomian kota dan tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk menjadi koperasi yang tangguh dan sehat. Namun, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang menegaskan bahwa lembaganya mengalami kendala dalam upaya menghidupkan kembali koperasi yang tidak aktif berikut hasil wawancara:

“kendala yang kami hadapi dalam menjalankan program ini yaitu minimnya partisipasi dari pengurus dan anggota koperasi. Ada sebagian koperasi yang tidak terlalu aktif mengikuti pelatihan baik karena keterbatasannya waktu maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya koperasi tersebut.” (hasil wawancara dengan Jamilus sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Senin 13 Mei 2024 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang menghadapi kendala dalam menghidupkan kembali koperasi yang tidak aktif. Dinas Koperasi Kota Padang mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kondisi koperasi sebagai dampak dari kendala tersebut.

Untuk membantu masyarakat memahami konsep dan jenis usaha yang akan dikembangkan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang siap memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada mereka yang ingin mendirikan koperasi. Sebenarnya untuk mendirikan koperasi tidak perlu datang lagi ke Dinas Koperasi dan UKM, cukup datang ke notaris saja.

Namun, pemerintah atau Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing daerah harus mengesahkan akta pendirian badan usaha koperasi sebelum dapat berbadan hukum. Hal ini akan memberikan kejelasan hukum bagi kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi. Berdasarkan arahan Dinas Koperasi dan UMKM, koperasi dapat memulai kegiatan usahanya setelah disahkan. Meskipun demikian, masih banyak anggota koperasi yang tidak menyadari hak dan kewajibannya sehingga koperasi tersebut berhenti beroperasi. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang terus berupaya menjalin hubungan dan memberikan pendampingan agar koperasi yang tidak aktif dapat kembali beroperasi. Berikut ini adalah data pelaksanaan kegiatan pelatihan koperasi pada tahun 2022–2023.

Tabel 1 8 Kegiatan program pelatihan koperasi tahun 2022

Nama Kegiatan	Waktu dan tempat	Narasumber	Jumlah peserta	materi
Tata cara Rapat Anggota Tahunan (RAT) ngkatan I dan II	Balaikop Provinsi Sumatera Barat	-Drs.Ferri E.Rinaldy, MM -Budiman, S. Hum -Saunida Agustuti, SE -Edwar, SE	60	Ketentuan umum rapat, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, tahapan pelaksanaan rapat anggota, simulasi rapat anggota, pelaksanaan rapat anggota, tindak lanjut rapat anggota, kebijakan perkoperasian.
Akutansi Syariah	LPMP Provinsi Sumatera Barat	-Drs.Ferri E.Rinaldy, MM - Nasfizar, SE, M. Si	30	Akad dan implementasi, konsep dasar akutansi syariah, siklus akutansi, konsep daar laporan keuangan syariah,

				transaksi pembiayaan syariah, transaksi kuntansi murabahah, perhitungan bagi hasil, penyajian laporan keuangan, simulasi transaksi koperasi syariah.
Kompetensi Bagi Pengurus Koperasi	Hotel Padang	-Drs. Ferri E. Rinaldy, MM -Akhmad Rizal -Hasbian Hasan -Lss Wahyu Anindya -Maylina Syarifah Rahmah - Karsimin	30	Strategi dan arah kebijakan pembagunan koperasi di Kota Padang, melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi, melakukan orientasi perkoperasian bagi calon dan anggota koperasi, melakukan kerjasama antar koperasi di bidang lain di bidang usaha, mengelola simpanan berjangka dan tabungan koperasi, menyusun rencana strategis, melakukan pengendalian intern, mengelola modal penyertaan dan dana sumber lainnya, mengelola modal sendiri

Sumber: Laporan Akhir pelatihan Dana DAK Non Fisik PK2UMK, 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 telah dilaksanakan tiga kali pelatihan dengan fokus pelatihan yang berbeda, yaitu Akuntansi Syariah, Kompetensi Pengurus Koperasi, dan Tata Tertib Rapat Anggota Tahunan (RAT) tingkat I dan II. Jumlah peserta yang dicakup

adalah 30–60 orang. Kantor koperasi berupaya untuk lebih meningkatkan pelatihan yang diberikan pada tahun 2023; berikut ini adalah pelaksanaan program pelatihan pada tahun 2023. Narasumber yang diundang untuk setiap kegiatan memiliki target materi yang berbeda-beda, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Namun, pelatihan tersebut masih belum memadai karena jumlah koperasi yang tidak aktif pada tahun 2022 semakin bertambah.

Tabel 1 9 Kegiatan program pelatihan koperasi tahun 2023

Nama Kegiatan	Waktu dan Tempat	Narasumber	Jumlah peseta	Materi
Pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi	Hotel Padang 14-16 februari 2023	-Drs. Ferri E. Rinaldy, MM -Rusheryadi Abbas, SE -Hadi Suryadi, SH,M.Si -Doli Kurnia Saputra,SE	30	Pelatihan manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen operasional, serta strategi bisnis
Pelatihan perkoperasian	Hotel Padang 15-17 maret 2023	-Drs. Ferri E. Rinaldy, MM -Zulfadli Mukhtar, SE Budiman,S.Hum Edwar SH	30	Pelatihan pengembangan koperasi, manajemen koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta regulasi yang mengatur koperasi
Pelatihan kompetensi pengurus koperasi	Hotel Padang 21-25 agustus	-Drs. Ferri E. Rinaldy, MM -Akhmad Rizal -Hasbian Hasan -Lss Wahyu	40	Pelatihan keterampilan teknis,keterampilan inter personal, kemampuan analisis

		-Anindya Maylina Syarifah Rahma		
		-Muhammad Nedi Apriadi		
Pemasaran Digital	Hotel Rangkayo Basa 11-13 oktober 2023	-Fauzan Ibnovi, ST, M.Si -Haviz Rahman -Susanto -Taufik Ismed -Mutia Quratul Aini -Riyan Aulia	80	Pelatihan tentang strategi pemasaran online, penggunaan medsos dan konten marketing

Sumber: Laporan Akhir pelatihan Dana DAK Non Fisik PK2UMK, 2023

Berdasarkan data di atas, pelaksanaan pelatihan pada tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan fokus pelatihan yang berbeda yaitu pelatihan pemasaran digital, pelatihan kompetensi, pelatihan koperasi, dan pelatihan manajerial koperasi. Dengan jumlah peserta 30-80 orang.

Pelatihan manajerial bagi koperasi ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan manajerial anggota atau pengurus Koperasi, pelatihan Perkoperasian berfokus pada pemahaman prinsip-prinsip dasar dan operasional Koperasi, Pelatihan Kompetensi bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi atau keterampilan tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan atau tugas tertentu, terakhir Pelatihan Pemasaran Digital berfokus pada teknik dan strategi pemasaran menggunakan platform digital.

Namun setelah dilakukan pelatihan ada beberapa peserta yang melaporkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Namun, ada pula beberapa peserta yang masih kesulitan dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan. Hal ini didukung oleh

pernyataan Kabid Pengawas Koperasi Diskop UKM Kota Padang yang menyatakan sebagai berikut:

“Beberapa peserta melaporkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti pelatihan. Mereka lebih mampu mengelola Koperasi dan menjalankan fungsi-fungsi penting, seperti pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan efektif, serta peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan strategis, namun ada juga yang kesulitan dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan terutama dalam manajemen risiko dan pengembangan usaha”(Hasil wawancara dengan Harce Novarina selaku Kabid pengawasan Koperasi, Kamis 29 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan yang telah dilakukan mungkin belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Koperasi di lapangan.

Meskipun ada beberapa indikasi bahwa pelatihan Koperasi di Kota Padang memberikan manfaat, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut dan mungkin penyempurnaan dalam metode pelatihan yang digunakan. Penyesuaian pelatihan yang lebih fokus pada kebutuhan spesifik setiap Koperasi, serta dukungan pasca pelatihan yang lebih intensif, Dinas Koperasi dan UMKM perlu mempertimbangkan strategi lanjutan untuk memastikan bahwa semua Koperasi dapat merasakan dampak positif dari pelatihan yang telah mereka terima.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memiliki tugas untuk membina dan mengembangkan koperasi di kota tersebut. Mayoritas koperasi di Kota Padang saat ini masih belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai tulang punggung perekonomian daerah, banyak koperasi yang saat ini beroperasi dengan buruk dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Jumlah sumber daya manusia di Dinas UMKM dan koperasi masih kurang memadai dibandingkan dengan 776 unit koperasi di Kota Padang. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah kurangnya pembinaan dan pengembangan dinas-dinas tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan Kabid pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang menyatakan sebagai berikut:

“Salah satu kendala yang kami alami dalam membina semua koperasi yang tidak aktif di Kota Padang ini yaitu keterbatasan sumber daya manusia dari Dinas, jadi tidak seluruhnya bisa terjangkau koperasi-koperasi yang bermasalah itu oleh kami” (hasil wawancara dengan Jamilus sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Senin 13 Mei 2024 pukul 09.00 WIB)

Adapun kendala lain yang dihadapi Dinas Koperasi dalam menghidupkan kembali koperasi-koperasi tidak aktif tersebut, dibuktikan dengan wawancara bersama Kabid Pengawas koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, berikut hasil wawancaranya:

“sulit menghubungi pengurus atau anggota koperasi yang bersangkutan. Setelah kami lakukan kunjungan langsung ke koperasi yang bermasalah tersebut seringkali tidak lagi ditemukan jejak bahkan ada koperasi yang hanya tersisa nama di papan saja padahal mereka masih terdata dalam dokumen resmi Dinas hal tersebut mengakibatkan Dinas kesulitan dalam proses pencabutan badan hukum dan juga pembubaran secara resmi kepada koperasi” (Hasil wawancara dengan Harce Novarina selaku Kabid Pengawas koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Jumat 19 Oktober 2024, pukul 10.30 WIB)

Menyikapi permasalahan yang ada berbagai upaya pemecahan masalah akan terus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di antaranya peningkatan pemahaman masyarakat tentang Koperasi seperti pemasyarakatan koperasi melalui sosialisasi dan peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi. Dengan berbagai masalah yang ada di dalam koperasi maka diperlukan strategi yang tepat agar dapat menguatkan kualitas dan kelayakan Koperasi itu sendiri. Keputusan strategis berhubungan dengan masa yang akan datang dalam waktu jangka panjang untuk organisasi secara keseluruhan.⁷

Latar belakang tersebut menunjukkan bahwa pengembangan koperasi di Kota Padang masih banyak menemui kendala. Dinas yang mengurus koperasi, khususnya yang tidak aktif di Kota Padang, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, merupakan lembaga yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan penyuluhan kepada koperasi. Untuk mengurangi

⁷ J. David Hunger & Thomas L. Wheelen (2002). Manajemen strategis. Yogyakarta: Andi

jumlah koperasi yang tidak aktif di Kota Padang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan penyuluhan kepada seluruh koperasi di Kota Padang, antara lain dengan menyusun rencana pembinaan dan pengembangan koperasi. Dengan adanya strategi tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan produktivitas Koperasi. Namun dilihat dari latar belakang dan data-data yang ada menunjukkan bahwa pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang masih belum optimal karena masih terdapat banyaknya Koperasi yang tidak aktif di Kota Padang

Dengan menggunakan teori strategi inti, peneliti akan mengkaji bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dilaksanakan dalam rangka mengatasi koperasi tidak aktif di Kota Padang. Diagnosis merupakan salah satu komponen teori strategi dasar. Tujuan diagnosis adalah mengidentifikasi keadaan, mengaitkannya dengan fakta, dan memperhatikan setiap isu yang muncul. Kedudukan koperasi tidak aktif di Kota Padang harus dikaji oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Kendala dalam menyelesaikan permasalahan koperasi tidak aktif di Kota Padang harus diketahui oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Mengetahui strategi dan tindakan apa yang digunakan merupakan tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kebijakan penuntun merupakan komponen kedua. Diagnosis yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar bagi kebijakan penuntun. Tentu saja, diperlukan kebijakan untuk mengatasi situasi dan kendala yang muncul dalam menghidupkan kembali koperasi yang tidak aktif. Di Kota Padang, kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan strategi penanggulangan koperasi yang tidak aktif.

Tindakan koheren merupakan komponen ketiga. Dua strategi inti yang merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan semua bagian yang telah ditetapkan sebelumnya, dilanjutkan

dalam strategi inti tindakan koheren ini. Berbagai pihak sumber daya manusia terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan koperasi tidak aktif di Kota Padang, tentu saja kemampuan SDM suatu organisasi dalam melaksanakan kewajibannya harus ditingkatkan. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi kepada pengurus dan anggota koperasi di Kota Padang dalam upaya peningkatan kompetensinya. Untuk mengurangi jumlah koperasi tidak aktif di Kota Padang, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai “Strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi Koperasi tidak aktif di Kota Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi koperasi tidak aktif di Kota Padang

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “menganalisis pelaksanaan strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi koperasi tidak aktif di Kota Padang” berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kajian administrasi publik dan administrasi pembangunan. Penelitian ini dapat membantu para akademisi maupun pihak lain yang berkepentingan dalam bidang kajian yang sama. Pengembangan teori administrasi publik,

khususnya yang berkaitan dengan Strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi koperasi tidak aktif di Kota Padang, merupakan manfaat lain dari penelitian ini..

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam rangka peningkatan evektifitas strategi dengan baik.

